



## **RENCANA KERJA**

# **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2022**

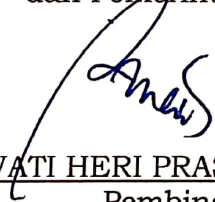
Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022

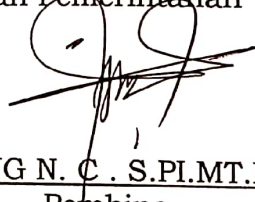
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

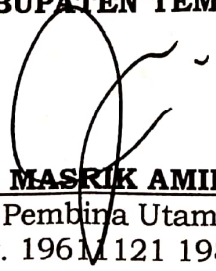
Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
RINAWATI HERI PRASTUTI, SE MM  
Pembina  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
NUNUNG N. C . S.PI.MT.M.Sc  
Pembina  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
IR. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1961121 198703 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan awal Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, September 2021

KERALA BPKPAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
TRI WINARNO / SE.MM  
Kabupaten Temanggung Tk. I  
NIP. 197310201999031005

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN VERIFIKASI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
LAMPIRAN .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 .....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.....	24
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .....	80
2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD .....	80
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....	104
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	104
2.7. Penghargaan .....	105
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	107
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	107
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD.....	107
3.3. Program dan Kegiatan.....	110
BAB IV : PENUTUP.....	133

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2020 .....	13
TABEL 2.2	Capaian Kinerja Per Sasaran BPPKAD.....	24
TABEL 2.3.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung.....	25
TABEL 2.4.	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022.	82
TABEL 2.5	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	104
TABEL 2.6	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021 .....	104
TABEL.2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	106
TABEL 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	108
TABEL 3.2.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....	111
TABEL. 3.3	Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....	117
TABEL. 4.1.	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022.....	134

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

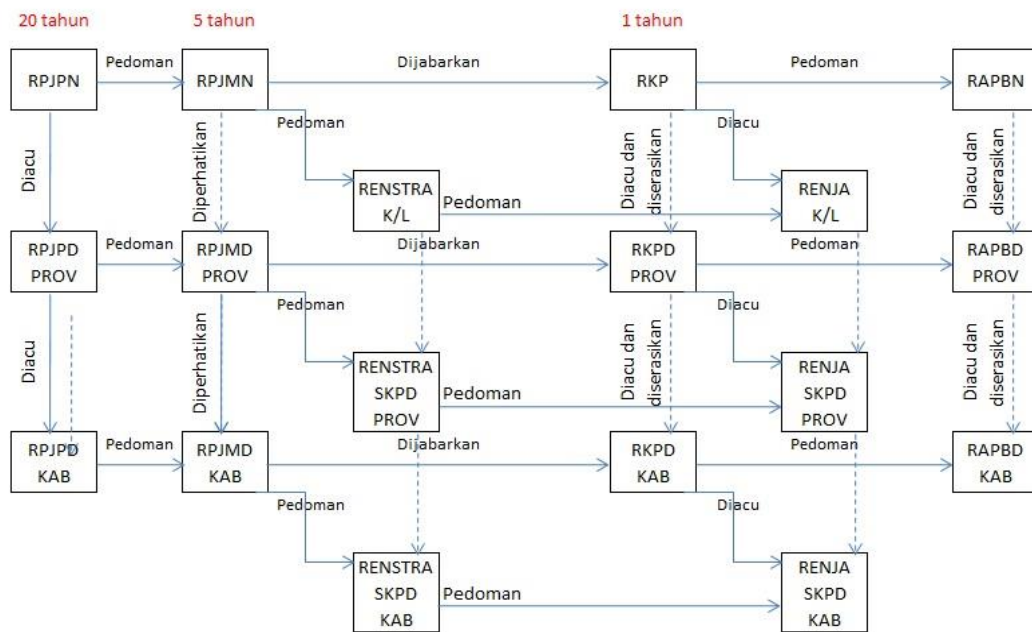
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**b. Analisis gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun



2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Penyediaan anggaran untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena penyediaan anggaran untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokras dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAHTAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP



**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun  
2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
40401	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah			4.397.418.160		983.111.378,00		897.418.160	298.682.400		202.859.743,00		67,92		1.185.971.121	26,97		
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,05		0,73			1,05		100		1			
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100			
404.01.001	Pendataan massal SISMIOB obyek / subyek PBB-P2	Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	OP	1E+06	2.445.034.972	6.591	642.029.000,00	3000	513.143.000	51.955.000	6393	22.506.000	100	43,32	12,984	664.535.000	27,18	
		Peta digitasi objek pajak (blok)	unit	4		1		1			1	0	100		2	0		
404.01.002	Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	SPPT	49000	1.952.383.188	17.184	341.082.378,00	10000	384.275.160	246.727.400	7184	180.353.743	71,84	73,10	24,368	521.436.121	26,71	
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	jenis pajak	69		75	0	9			6	0	66,67		81	0		
		Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	OP	33		34	0	5			1	0	20		35	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40401												71,70						
Predikat												Sedang						
40402	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah			51,45	2.135.000.000		1.420.741.292,00		550.000.000	1.040.801.216		952.021.682,00		91,47		2.372.762.974	111,14	
		Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9		0,66		2,9			0,66		22,76		1			
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100		100			100		100		100			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
404.02.00 1	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	OP	49000	575.000.000	13485	301.752.750,00	3000	150.000.000	164.024.400	3985	156.710.250	100,00	95,54	17,470	458.463.000	79,73			
		Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB)	SIM PBB	4		1	0	1			1	0	100,00		2	0				
404.02.00 2	Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak massal	SPPT	3E+06	880.000.000	1.803.500	463.049.418,00	1250000	200.000.000	328.751.016	#####	301.262.815	100,00	91,64	#####	764.312.233	86,85			
404.02.00 3	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah	Pajak Daerah	35	680.000.000	16	655.939.124,00	7	200.000.000	548.025.800	7	494.048.617	100	90,15	23	1.149.987.741	169,12			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40402</b>													<b>100,00</b>							
<b>Predikat</b>													<b>Sangat Tinggi</b>							
<b>40403</b>	<b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>			<b>95</b>	<b>486.000.000</b>		<b>128.444.369,00</b>	<b>92,5</b>	<b>106.000.000</b>	<b>54.631.900</b>		<b>52.260.813,00</b>		<b>95,66</b>		<b>100.998.691</b>	<b>20,78</b>			
		<b>Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah</b>	%	<b>95</b>		<b>100</b>		<b>90</b>			<b>100</b>		<b>111,11</b>		<b>100</b>					
		<b>Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu</b>	%	<b>95</b>		<b>100</b>		<b>95</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>					
404.03.00 3	Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	Bulan	60	300.000.000	24	87.155.969,00	12	65.000.000	41.027.500	12	38.766.413	100,00	94,49	36	125.922.382	41,97			
404.03.00 4	Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	186.000.000	24	41.288.400,00	12	41.000.000	13.604.400	12	13.494.400	100,00	99,19	36	54.782.800	29,45			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40403</b>													<b>100,00</b>							
<b>Predikat</b>													<b>sangat tinggi</b>							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40404	Program pengelolaan keuangan daerah			97,49	8.917.917.000		997.283.406	96,84	1.728.297.000	1.337.237.700		984.793.315,00		73,64		0	0,00	
		Realisasi belanja terhadap APBD	%	89,96		90,05		89,35			90,05		100		90			
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		99,93		100			99,93		99,93		100			
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		85,71		100			85,71		85,71		86			
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100		100		98			100		100		100			
404.04.001	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	Dokumen	48	846.150.000	48	236.485.750	4	150.000.000	150.000.000	4	135.845.250	100	90,56	52	372.331.000	44,00	
404.04.002	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	Aplikasi	48	520.000.000		16.500.000	4	100.000.000	100.000.000	0	16.500.000	0	17	-	33.000.000	6	
404.04.003	Pengelolaan Gaji	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	orang/ASN	37400	1.128.200.000	67.924	210.762.838	7500	200.000.000	145.650.300	7500	97.977.488	100	67,27	75.424	308.740.326	27,37	
404.04.004	Penelitian RKA & pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA, DPPA	Dokumen	40900	564.100.000	11050	78.415.800	9600	100.000.000	46.699.800	9600	41.128.300	100,00	88,07	20.650	119.544.100	21,19	
404.04.005	Penyusunan APBD Kab.Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Dokumen	30	3.764.000.000	24	1.279.656.047	6	820.000.000	681.212.600	6	624.843.884	100	91,73	30	1.904.499.931	50,60	
404.04.006	Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi	orang/ASN	175	495.987.000	130	132.513.436	40	78.297.000	78.290.000	40	68.498.393	100	87,49	170	201.011.829	40,53	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		PTT&Tenaga kontrak)																
404.04.009	Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan)	Tersusunnya analisis standar belanja untuk lanjutan	Dokumen	125	1.128.200.000			25	200.000.000	135.385.000	0	0	0	0	-	0	0	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40404</b>												<b>71,43</b>						
<b>Predikat</b>												<b>sedang</b>						
<b>40405</b>	<b>Program pengelolaan aset</b>			<b>93,6</b>	<b>2.537.925.000</b>		<b>570.101.653</b>	<b>90,62</b>	<b>485.000.000</b>	<b>538.847.500</b>		<b>257.659.930,00</b>		<b>47,82</b>		<b>827.761.583</b>	<b>32,62</b>	
		<b>Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja</b>	%	<b>88.1</b>		<b>66,47</b>		<b>82,74</b>			<b>66,47</b>		<b>80,34</b>		<b>66</b>			
		<b>Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja</b>	%	<b>99.1</b>		<b>99,39</b>		<b>98,49</b>			<b>99,39</b>		<b>100</b>		<b>99</b>			
404.05.001	Persertifikatan tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	220	530.912.500	85	106.126.573	45	95.000.000	218.927.500	45	76.685.900	100	35,03	130	182.812.473	34,43	
404.05.002	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	Unit kerja	840	849.250.000	210	298.845.858	168	165.000.000	192.652.200	120	156.830.809	71,43	81,41	330	455.676.667	53,66	
		Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA	Aplikasi	5		1	0	1			1	0	100		2	0		
404.05.003	Pembinaan pejabat pengurus barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Unit kerja	840		168		0	0	0	0	0			168	0		
		Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang	unit kerja	840		168		168			168	0	100		336	0		
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	unit kerja	840		168		168			168	0	100		336	0		
404.05.004	Penatausahaan barang milik daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta	unit kerja	840	265.412.500	217	46.952.000	168	50.000.000	16.493.000	168	3.037.500	100	18,42	385	49.989.500	18,83	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
		pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah																	
404.05.005	Pemberdayaan barang milik daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	tanah/bangunan	17205	892.350.000	3000	118.177.222	3441	175.000.000	110.774.800	2950	21.105.721	85,73	19,05	5.950	139.282.943	15,61		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40405</b>												<b>93,88</b>							
<b>Predikat</b>												<b>Sangat tinggi</b>							
<b>40406</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>98</b>	<b>12.795.280.000</b>		<b>3.917.982.737</b>	<b>95</b>	<b>2.238.000.000</b>	<b>1.764.293.500</b>		<b>1.620.767.660,00</b>		<b>91,86</b>		<b>5.538.750.397</b>	<b>43,29</b>		
		<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable</b>	%	<b>98</b>		<b>82,98</b>		<b>95</b>			<b>82,98</b>		<b>87,35</b>		<b>83</b>				
		<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	%	<b>98</b>		<b>82,98</b>		<b>95</b>			<b>82,98</b>		<b>87,35</b>		<b>83</b>				
404.06.001	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Unit kerja	840	12.264.000.000	256	3.835.207.700	168	2.078.000.000	1.682.743.000	167	1.578.470.700	99,40	93,80	423	5.413.678.400	44,14		
404.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	Dokumen	5	531.280.000	2	82.775.037	1	160.000.000	81.550.500	1	42.296.960	100	51,87	3	125.071.997	23,54		
		Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	Unit kerja	525		132		105			105	0	100		237	0			
404.06.007	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur				0				0	0	0	0			-	0			
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>												<b>99,80</b>							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Kegiatan pada Program 40406</b>													sangat tinggi					
<b>Predikat</b>																		
<b>40701</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelibngan perangkat daerah</b>			<b>100</b>	<b>29.500.000</b>		<b>6.973.200</b>	<b>100</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.225.000</b>		<b>2.839.000,00</b>		<b>88,03</b>		<b>9.812.200</b>	<b>33,26</b>	
		<b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>81,82</b>		<b>100</b>			<b>81,82</b>		<b>81,82</b>		<b>81,82</b>			
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	dokumen	167	29.500.000	67	6.973.200	33	3.500.000	3.225.000	33	2.839.000	100,00	88,03	100	9.812.200	33,26	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701</b>													<b>100,00</b>					
<b>Predikat</b>													<b>Sangat Tinggi</b>					
<b>40702</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.553.568.000</b>	<b>100</b>	<b>1.362.348.200</b>	<b>100</b>	<b>874.000.000</b>	<b>830.040.204</b>	<b>100</b>	<b>723.759.916,00</b>	<b>100</b>	<b>87,20</b>	<b>100</b>	<b>2.086.108.116</b>	<b>45,81</b>	
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Bulan	60	1.180.000.000	24	372.895.457	12	220.000.000	209.671.152	12	194.296.639	100,00	92,67	36	567.192.096	48,07	
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS	Bulan	60	900.000.000	24	209.385.693	12	175.000.000	195.000.000	12	192.095.851	100,00	98,51	36	401.481.544	44,61	
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	179.230.000	24	39.682.500	12	30.000.000	27.502.500	12	20.948.500	100,00	76,17	36	60.631.000	33,83	
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	86.410.000	24	74.916.750	12	20.000.000	39.999.800	12	34.958.250	100,00	87,40	36	109.875.000	127,16	
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	99.615.000	24	28.035.900	12	15.000.000	13.000.000	12	11.892.000	100,00	91,48	36	39.927.900	40,08	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bulan	60	16.623.000	24	4.272.000	12	3.000.000	2.520.000	12	2.136.000	100,00	84,76	36	6.408.000	38,55	
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	474.485.000	24	108.116.950	12	80.000.000	64.460.752	12	48.519.950	100,00	75,27	36	156.636.900	33,01	
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	470.000.000	24	127.616.933	12	100.000.000	79.975.000	12	33.843.151	100,00	42,32	36	161.460.084	34,35	
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	33.205.000	24	7.040.000	12	5.000.000	1.500.000	12	1.495.000	100,00	99,67	36	8.535.000	25,70	
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS	Bulan	60	610.000.000	24	267.807.000	12	100.000.000	62.971.000	12	60.995.558	100,00	96,86	36	328.802.558	53,90	
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	tersedianya honor satpam	orang	24	504.000.000	24	122.579.017	12	126.000.000	133.440.000	12	122.579.017	100,00	91,86	36	245.158.034	48,64	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702</b>												<b>100,00</b>						
<b>Predikat</b>												<b>Sangat Tinggi</b>						
<b>40703</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>			<b>100</b>	<b>2.405.125.000</b>		<b>1.008.842.639</b>	<b>100</b>	<b>791.000.000</b>	<b>684.112.830</b>		<b>580.535.786,00</b>		<b>84,86</b>		<b>1.589.378.425</b>	<b>66,08</b>	
		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput	Bulan	60	600.000.000	24	202.953.499	12	250.000.000	90.396.430	12	88.298.999	100,00	97,68	36	291.252.498	48,54	



KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAP AIA N s/d 202 0 Rp	KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP)	Bulan	60	376.000.000	24	228.183.450	12	146.000.000	175.010.000	12	172.830.000	100,00	98,75	36	401.013.450	106,65		
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	256.025.000	24	144.729.000	12	140.000.000	154.676.400	12	86.283.000	100,00	55,78	36	231.012.000	90,23		
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Bulan	60	604.000.000	24	263.343.940	12	150.000.000	163.620.000	12	136.782.787	100,00	83,60	36	400.126.727	66,25		
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya service lift dan genset	Bulan	60	282.050.000	24	66.147.000	12	50.000.000	27.410.000	12	23.475.500	100,00	85,65	36	89.622.500	31,78		
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)	Bulan	60	287.050.000	24	103.485.750	12	55.000.000	73.000.000	12	72.865.500	100,00	99,82	36	176.351.250	61,44		
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40703</b>												<b>100,00</b>							
<b>Predikat</b>												<b>sangat tinggi</b>							
<b>40704</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>26.250.000</b>		<b>12.500.000</b>	<b>100</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta	tersedianya pakiamn dinas	50 pegawai	3E+07	26.250.000	50	12.500.000	50	12.500.000	12.500.000	50	12.500.000	100	100	100	25.000.000	95		



Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-
  - b. Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah
  - c. Percetakan SPPT PBB-P2
  - d. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
  - e. Percetakan SPPT PBB-P2
  - f. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
  - g. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah
  - h. Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah
  - i. Penyusunan KUA dan PPAS
  - j. Pengelolaan Gaji
  - k. Penelitian RKA & pengesahan DPA
  - l. Penyusunan APBD Kab.Temanggung
  - m. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)
  - n. Persertifikatan tanah
  - o. Penatausahaan barang milik daerah
  - p. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - q. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- a. Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah 71,84 % target 10.000 terealisasi 7.184 karena pandemic covid
- b. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah. Karena sudah berganti menggunakan SIPD dari Kemendagri.
- c. Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- d. Pengelolaan barang milik daerah tidak tercapai karena refocusing anggaran covid
- e. Pembinaan pejabat pengurus barang tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- f. Pemberdayaan barang milik daerah target 3441 terealisasi 2950 karena refocusing anggaran covid
- g. Pengelolaan Keuangan Daerah 99,4 target 168 terealisasi 167 karena laporan akhir dilaporkan pada tahun depannya
- h. Fasilitasi Bantuan Keuangan tidak dilaksanakan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **93,95%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	na	Sangat Baik
	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2	91,76	Sangat Baik
	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	2	61,32	cukup
4.	Peningkatan pendapatan daerah	2	98,70	Sangat Baik
5	Pengelolaan keuangan daerah	4	95,55	Sangat Baik
6	Pengelolaan aset	2	87,72	Sangat Baik
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	2	84,67	Baik
	Rata rata		93,95	Sangat Baik

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	sat	TARGET					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2020 (%)	STATUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA				100	TT
1	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,14	1,06				83,52	TT
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
2	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	7,20	0,66				22,64	UK
	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
3	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	90	90	90	95	98,91	92,54				97,41	AT
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00				100	TT
4	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	89,35	91,07	90,51	89,51	92,71	90,05				100	TT
5	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	100	100	100	100	97,83	96,49				96,49	AT
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	57,14	85,71				85,71	AT
	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	98	98	100	100	100	100				100,00	TT
6	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	81,55	66,47				75,45	AT
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	98,55	99,39				100	TT
7	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	95	95	97	98	100	82,98				84,67	AT
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	95	97	98	85,11	82,98				84,67	AT

JUMLAH INDIKATOR SASARAN	1		100,00	1
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	14		87,90	14
<b>JUMLAH IKPD</b>	<b>15</b>		<b>93,95</b>	<b>15</b>

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan **status telah tercapai** ada 8 (delapan) terdiri dari:

a. Indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak dengan capaian 1,06 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Pendataan SISMIOP yang ditetapkan di tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2019
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Perubahan SPPT PBB-P2 ditiadakan karena penundaan distribusi SPPT.
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Pengajuan perubahan SPPT tetap diterima namun diterbitkan pada tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja Program Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Jumlah pemohon sebanyak 5.497 yang datang langsung diverifikasi
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Tidak ada karena semua berkas terverifikasi
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.



c. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - 1.199 SKPD yang diterbitkan oleh sub bidang penetapan pendapatan terdiri dari 607 SKPD reklame, 497 SKPD Air Tanah, dan 95 SKPDKB BPHTB
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Kebutuhan wajib pajak akan penerbitan SKPD itu sendiri (baik pajak reklame, pajak air tanah, maupun SKPDKB BPHTB)
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Untuk SKPD reklame sempat terhambat penerbitannya karena penerbitan SKPD pajak reklame diharuskan menunggu izin reklame selesai dibuat. Sehingga beberapa kali terjadi ketika izin reklame sudah selesai, pajaknya tidak dibayarkan.

d. Indikator Kinerja Program Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan capaian 101,80 % berstatus Tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan karena *pandemic*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik

dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

e. Indikator Kinerja Program Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
  - 14 OPD Sudah melaporkan semua
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Sudah melaporkan semua

f. Indikator Kinerja Program Persentase Realisasi Belanja Terhadap APBD dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Target kinerja
- Faktor penghambat keberhasilan
  - *Pandemic Covid-19*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Pemda mendorong PD segera melaksanakan target kinerja

g. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan.
  - kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
- Faktor penghambat keberhasilan

- SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPPKAD
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - kordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan
- h. Indikator Kinerja Program Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja dengan capaian 99,39 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Capaian indikator dengan **status tercapai** ada 5 (lima) terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Program Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dengan capaian 96,49 % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Penggunaan Aplikasi *E-Budgeting* yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*

- Faktor penghambat keberhasilan
    - Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan pada periode tertentu sehingga berdampak pula terhadap kebijakan penganggaran program/kegiatan
    - Kemampuan keuangan daerah tidak bisa mengcover semua kegiatan yang direncanakan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Perencanaan program/kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- b. Indikator Kinerja Program Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Keterlambatan input di *e-budgeting* oleh beberapa SKPD pengampu program/kegiatan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Asistensi penganggaran kepada SKPD terkait
- c. Indikator Kinerja Program Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dengan capaian 92,56 % berstatus akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Penggunaan Aplikasi SIMBADA
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Sumber Daya Manusia di SKPD
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Koordinasi dengan SKPD lebih intensif

- d. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan capaian 82,98 % % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Laporan Keuangan disusun berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
    - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor
    - Penggunaan Aplikasi Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan kas bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
    - Melaksanakan asistensi kepada perangkat Daerah
    - Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan SKPD
- e. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dengan capaian 82,98 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD
    - Disiplin dan tertib penatausahaan dan akuntansi keuangan SKPD

- Faktor penghambat keberhasilan
    - Pada saat IKD dilaporkan, SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan kas bulanan bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
    - Melakukan desk untuk percepatan penyusunan laporan keuangan
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) yaitu :
- a. Indikator Kinerja Program Persentase pemutakhiran obyek pajak dengan capaian 0,66 % berstatus Upaya keras
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Realisasi pemutakhiran s/d triwulan IV Tahun 2020 sebanyak 3.985 SPPT. Pemutakhiran ini terdiri dari pemutakhiran data perumahan (tindak lanjut rekomendasi KPK pendataan PBB perumahan) , perubahan data atas permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terkait kepentingan pembangunan irigasi di Desa Geblog, pengajuan pemutakhiran data reguler untuk tahun 2021, serta perubahan data bangunan untuk kepentingan BPHTB.
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek

pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajibannya;

- Permintaan data terkait pembebasan tanah 94 OP untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Adanya beberapa kebijakan yang tumpang tindih dalam PBB-P2 tahun 2020 ini (reklasifikasi NJOP, stimulus PBB, serta pengurangan 50% ketetapan PBB) menyebabkan beberapa rumusan yang sangat rumit dalam aplikasi sismiop dan opentax, sehingga proses perubahan SPPT (terutama penetapan terseleksi di tahun 2020) sebisa mungkin tidak dilakukan, karena dapat menyebabkan pergerakan ketetapan yang tidak biasa mengingat banyaknya rumusan dan variabel yang di luar kebiasaan dalam PBB tahun ini

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 87,90 %, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8 kali WTP  
 Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

### 2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di bidang Keuangan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.  
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir ( Tahun 2015 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

## 2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah  
Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	212.498. 139.929	259.065.008. 786	308.466.748. 340	252.019.934. 778	278.306.408. 650	307.431.698. 576
Realisasi Pendapatan Daerah	1.469.48 2.958.10 5	1.678.688.07 9.170	1.779.850.39 4.321	1.731.168.36 6.276	1.840.953.30 6.303	1.830.789.90 7.558
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	14,46	15,43	17,33	14,56	15,12	16,79

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah tercapai sebesar 16,79% dari realisasi pendapatan daerah, persentase 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi pendapatan asli daerah berjalan dengan baik.

Tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, sedangkan untuk tahun 2020 ini meskipun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019.

Tabel 2.2.  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	212.498.139.92 9	281.328.148.9 70	308.466.748.3 40	252.019.934.7 78	278.306.408.6 50	307.431.698.5 76
I.A Hasil Pajak Daerah	31.523.819.462	32.480.985.44 9	38.291.278.09 4	40.401.374.47 0	53.424.094.04 6	47.887.604.81 3
I.B Hasil Retribusi Daerah	13.410.490.650	63.764.882.91 6	16.687.218.83 7	12.702.535.34 4	16.189.001.24 9	8.436.169.882
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.060.826.000	13.013.670.03 8	13.762.738.26 1	24.857.473.73 1	14.571.585.06 4	18.800.858.16 5
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	154.508.000.56 0	172.068.610.5 67	239.725.513.1 48	174.058.551.2 33	190.121.728.2 91	232.307.065.7 16

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%.

### 3. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah  $n-1$  dibagi  $n$  dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.  
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah objek pajak terdata	493.494	525.243	579.607	600.224	607.052	606.871
Peningkatan OP	2.830	31.749	54.364	20.617	6.828	6.393
Persentase Peningkatan OP	0,576%	6,43%	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Kenaikan jumlah objek pajak tahun 2020 dikarenakan adanya pendataan SISMIOP pada tahun 2019 yang ditetapkan di tahun 2020,

Adapun data objek pajak 6 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2.  
Data Objek pajak 6 Tahun  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HOTEL	14	14	16	18	18	18
RESTORAN	198	181	183	177	610	600
HIBURAN	16	19	28	34	19	13
PARKIR	36	37	46	71	56	55
REKLAME	NA	876	735	671	618	607
PPJ	138.462	137.402	136.564	138.816	138.377	138.599
BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
AIR TANAH	NA	374	363	371	417	497
PBB	493,494	525,243	579,607	600,224	607.052	606.871

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

#### 4. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi: Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.873	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985
		BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.135	4.178	3.957	10.966	7.184
2.	Berkas Terverifikasi	PBB-P2	1.873	1.701	1.113	1,055	8.305	3.985
		BPHTB	NA	3.434	3.065	2.902	2.661	3.199
	Jumlah		1.873	5.135	4.178	3.957	10.966	7.184

3.	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
----	----------------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 4.2.

Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DEK
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	0	0	0	0	0	0	2.269	191	929	366	185	45
		BPHTB	0	461	261	174	104	217	276	200	410	283	461	352
	Jumlah		0	461	261	174	104	217	2.545	391	1.339	649	646	397

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada tahun 2020, dimulai bulai Juli karena pandemi covid-19 sehingga SPPT PBB-P2 baru didistribusikan ke Desa dan Kelurahan pada Bulan Juli 2020, sedangkan untuk permohonan BPHTB pada bulan Januari tidak ada pengajuan dikarenakan masih menunggu Keputusan Bupati tentang penyesuaian NJOP.

### 5. Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak.

Pemutakhiran Obyek Pajak adalah suatu kegiatan memperbaharui data Obyek Pajak (OP) dan data Subyek Pajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2014). Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korsupgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi:

a) Proses mutasi nama,

- b) Proses perubahan data,
- c) Proses mutasi pecah,
- d) Proses mutasi gabung,
- e) Pengajuan OP baru,
- f) Proses fasum/hapus.

Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan database aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entri data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurangan kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada kenaikan pemasukan PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambahan data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Pencantuman nilai bangunan pada SSPD BPHTB tentu saja

menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT. Sementara proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di database SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (Smartmap).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam data base aplikasi SISMIOP dan smartmap.

Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain.

Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyek pajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Adapun persentase pemutakhiran objek pajak Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.  
Persentase Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2015-2020  
s.d Triwulan IV

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	10.965	12.120	22.430	14.832	43.237	3.985

2	Jumlah OP PBB secara keseluruhan	<b>493.44</b> 1	<b>525.22</b> 9	<b>579.59</b> 4	<b>587.12</b> 3	<b>600.47</b> 8	606.871
3.	Persentase (%)	2,2	2,3	3,9	2,5	7,2	0,66

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2015 s.d 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 menurun, tahun 2019 meningkat, namun tahun 2020 turun drastis dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 kebijakan daerah menunda distribusi SPPT dan tidak menerima permohonan perubahan SPPT.

Dalam proses pemutakhiran, semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat. Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat kita lihat jumlah SPPT PBB-P2 tahun pajak 2020 yang dimutakhirkan sampai 31 Desember 2020 tercatat 3.985 SPPT, agak jauh dari angka pemutakhiran di tahun sebelumnya. Hal ini tak lain disebabkan karena proses pengajuan perubahan SPPT oleh wajib pajak (baik itu mutasi nama, mutasi pecah, mutasi gabung, obyek pajak baru, dan penghapusan obyek pajak) untuk tahun ini ditiadakan. Bermula dari banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya mendorong para pembuat kebijakan di bidang pendapatan untuk membuka proses pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2, namun penetapannya untuk tahun 2021.

Tabel 5.3.  
Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2020  
s.d Triwulan IV

Uraian	Jan	Feb	Mar	April	mei	Juni	Jul	Agustus	Sep t	Okt	Nop	Des	Jumlah
Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya	0	0	0	0	0	0	2.269	191	929	366	185	45	3.985



## 6. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada.

Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.  
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu  
Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	1.737	2.151	2.140	1.788	<b>1.728</b>	1.197
2	Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD	1.737	2.151	2.140	1.788	1.728	1.197
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 6.2.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020 Sampai dengan Triwulan IV

No.	Jenis Pajak	Juli 2020	Agustus 2020	September 2020	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1.	Air Tanah	41	42	44	46	51	497	<b>497</b>
2.	Reklame	16	139	57	101	71	605	<b>607</b>
3.	BPHTB	15	1	0	0	0	95	<b>95</b>
	Jumlah	54	72	101	147	122	79	<b>1.197</b>

## 7. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.  
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558
Target Pendapatan Daerah	1.460.287.073.763	1.709.015.655.249	1.782.091.942.671	1.746.113.814.151	1.861.308.494.735	1.798.454.020.290
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	100,63	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32

Sumber: CALK 2014-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111.

Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

Tabel 7.2.  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997	307.431.698.576
Dana Perimbangan	1.247.688.130.253	1.395.299.245.901	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266	1.046.567.778.773
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	9.296.687.923	2.060.684.299	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040	476.790.430.209
Jumlah	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang III BPPKAD Kab. Temanggung

## 8. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1.  
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	22	20	19	19	14	14
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	22	20	19	19	14	14
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 8.2.  
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

N O	NAMA OPD	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
5	Dinas Tenaga Kerja	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
6	Dinas Lingkungan Hidup					√	-	√	-	√	-	√	-
7	Dinas Perhubungan					√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	-			√	-	√	-	√	-	√	-
11	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
12	Kecamatan Temanggung					√	-	√	-	√	-	√	-
13	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
14	Kecamatan Parakan					√	-	√	-	√	-	√	-

15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			√	-	√	-	√	-				
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	-	√	-	√	-	√	-				
17	Dinbudparpora	√	-	√	-	√	-	√	-				
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	-			√	-	√	-				
19	Kecamatan Kaloran					√	-	√	-				
20	RSUD Temanggung	√	-	√	-								
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo	√	-	√	-								
22	Kelurahan Temanggung II	√	-	√	-								
23	Kelurahan Butuh			√	-								
24	Kelurahan Jampirejo	√	-	√	-								
25	Kelurahan Banyuurip	√	-	√	-								
26	Kelurahan Kebonsari	√	-	√	-								
27	Kelurahan Sidorejo	√	-	√	-								
28	Kelurahan Parakan Wetan	√	-	√	-								
29	Dinas Pertanian dan Bunhut	√	-	√	-								
30	Kelurahan Jampiroso	√	-										
<b>Jumlah</b>		22	0	20	0	19	0	19	0	14	0	14	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan.

perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2016 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2016 berjumlah 20 OPD.

## **9. Realisasi Belanja Terhadap APBD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai 2020 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 9.**

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten  
Temanggung  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Realisasi Belanja (Rp)	1.505.003.745. 055	1.739.541.988 .789	1.768.574.354 .911	1.670.309.285 .608	1.841.033.63 5.270	1.783.202.807. 598,00
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.729.185.922. 576	1.881.134.953 .956	1.841.286.645 .554	1.782.086.882 .170	1.946.665.37 8.928	1.903.418.786. 991,00
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	87,04	92,47	96,05	93,73	94,57	93,68

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun meningkat dari 87,04% menjadi 94,57%, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase Belanja menurun menjadi 93,73 %. Belanja pada tahun 2018 menurun dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun sehingga belanja juga menurun. Tahun 2020 capaian belanja sampai dengan Triwulan IV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari pandemi covid. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, APBD Kabupaten Temanggung mengalami penyesuaian sehubungan dengan penanganan covid-19. Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja mengalami refocusing dan realokasi untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2015-2020 adalah sebesar 93 %. Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

-162448190605

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
				Rupiah	(%)
4	PENDAPATAN	1.789.293.083.624,00	1.830.789.907.558,00	41.496.823.934,00	2,32
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	307.431.698.576,00	55.462.112.825,00	22,01
411	Hasil Pajak Daerah	36.723.000.000,00	47.887.604.813,00	11.164.604.813,00	30,40
41101	Pajak Hotel	150.000.000,00	170.636.594,00	20.636.594,00	13,78
41102	Pajak Restoran	1.294.000.000,00	1.916.160.155,00	622.160.155,00	48,08
41103	Pajak Hiburan	34.000.000,00	39.936.150,00	5.936.150,00	17,46
41104	Pajak Reklame	300.000.000,00	519.430.836,00	219.430.836,00	73,14
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.500.000.000,00	15.932.617.325,00	432.617.325,00	2,79
41107	Pajak Parkir	75.000.000,00	114.054.600,00	39.054.600,00	52,07
41108	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	272.188.236,00	2.188.236,00	0,81
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.100.000.000,00	12.765.965.103,00	2.665.965.103,00	26,40
41113	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	16.156.615.814,00	7.156.615.814,00	79,52
412	Hasil Retribusi Daerah	7.492.767.100,00	8.436.169.882,00	943.402.782,00	12,59
41201	Retribusi Jasa Umum	5.351.802.250,00	5.719.411.972,00	367.609.722,00	6,87
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.350,00	1.162.595.760,00	432.667.410,00	59,28
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.411.036.500,00	1.554.162.150,00	143.125.650,00	10,14
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.555.026.271,00	18.800.858.165,00	(754.168.106,00)	(3,86)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.198.792.380,00	232.307.065.716,00	44.108.273.336,00	23,44
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	38.271.800,00	26.271.800,00	218,93
41402	Jasa Giro	2.904.180.034,00	2.682.531.338,00	(221.648.696,00)	(7,63)
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.357.372.256,00	2.086.838.674,00	63,81
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	31.043.819,00	21.043.819,00	210,44
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00	2.810.979.230,00	1.221.594.913,00	76,86
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	178.249.945.947,00	219.089.857.973,00	40.839.912.026,00	22,91
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.157.748.500,00	2.269.124.300,00	111.375.800,00	5,16
41418	Pendapatan Denda Pelanggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DANA PERIMBANGAN	1.051.153.212.299,00	1.046.567.778.773,00	(4.585.433.526,00)	(0,44)
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.012.781.000,00	52.880.696.555,00	1.867.915.555,00	3,66
42101	Bagi Hasil Pajak	49.051.299.000,00	51.081.093.306,00	2.029.794.306,00	4,14
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.961.482.000,00	1.799.603.249,00	(161.878.751,00)	(8,25)

422	Dana Alokasi Umum	770.269.689.000,00	762.027.309.000,00	(8.242.380.000,00)	(1,07)
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.916.187.000,00	737.916.187.000,00	0,00	0,00
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	32.353.502.000,00	24.111.122.000,00	(8.242.380.000,00)	(25,48)
423	Dana Alokasi Khusus	229.870.742.299,00	231.659.773.218,00	1.789.030.919,00	0,78
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	39.620.675.000,00	37.588.938.737,00	(2.031.736.263,00)	(5,13)
42302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.292.412.299,00	186.392.326.659,00	12.099.914.360,00	6,94
42303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	15.957.655.000,00	7.678.507.822,00	(8.279.147.178,00)	(51,88)
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	486.170.285.574,00	476.790.430.209,00	(9.379.855.365,00)	(1,93)
431	Pendapatan Hibah	79.509.964.574,00	71.776.230.000,00	(7.733.734.574,00)	(9,73)
43106	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.509.964.574,00	71.776.230.000,00	(7.733.734.574,00)	(9,73)
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
43403	Dana Insentif Daerah	56.311.496.000,00	56.311.496.000,00	0,00	0,00
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
43501	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.967.000.000,00	6.655.760.238,00	(1.311.239.762,00)	(16,46)
436	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
43601	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.789.293.083.624,00	1.830.789.907.558,00	41.496.823.934,00	2,32
5	BELANJA	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.270.761.798.151,00	1.213.287.179.823,00	(57.474.618.328,00)	(4,52)
511	BELANJA PEGAWAI	716.635.962.801,00	671.072.509.371,00	(45.563.453.430,00)	(6,36)
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	622.050.103.778,00	580.973.511.613,00	(41.076.592.165,00)	(6,60)
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.135.900.000,00	81.442.659.929,00	(3.693.240.071,00)	(4,34)
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00	6.521.788.000,00	(212.000,00)	(0,00)
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.175.000.000,00	1.705.150.000,00	(469.850.000,00)	(21,60)
51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	752.959.023,00	429.399.829,00	(323.559.194,00)	(42,97)
514	BELANJA HIBAH	71.157.887.850,00	68.809.177.692,00	(2.348.710.158,00)	(3,30)
51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	71.157.887.850,00	68.809.177.692,00	(2.348.710.158,00)	(3,30)
515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.782.520.000,00	7.162.252.000,00	(1.620.268.000,00)	(18,45)
51501	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.112.520.000,00	835.152.000,00	(277.368.000,00)	(24,93)
51502	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
51503	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	7.645.000.000,00	6.302.100.000,00	(1.342.900.000,00)	(17,57)
516	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.502.600.000,00	6.484.504.647,00	(18.095.353,00)	(0,28)
51603	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00	4.810.600.000,00	0,00	0,00
51605	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.692.000.000,00	1.673.904.647,00	(18.095.353,00)	(1,07)
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa	411.446.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.643.831.600,00)	(0,40)
51703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	411.446.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.643.831.600,00)	(0,40)
518	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(6.280.259.787,00)	(11,17)
51801	Belanja Tidak Terduga	56.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(6.280.259.787,00)	(11,17)
52	BELANJA LANGSUNG	632.656.988.840,00	569.915.627.775,00	(62.741.361.065,00)	(9,92)
521	BELANJA PEGAWAI	132.227.665.531,00	122.876.914.568,00	(9.350.750.963,00)	(7,07)
52101	Honorarium PNS	10.580.863.000,00	8.298.660.800,00	(2.282.202.200,00)	(21,57)
52102	Honorarium Non PNS	83.070.908.941,00	80.469.550.910,00	(2.601.358.031,00)	(3,13)
52103	Uang Lembur	1.413.822.272,00	1.078.486.073,00	(335.336.199,00)	(23,72)
52104	Belanja Pegawai BOS	19.947.133.118,00	18.397.082.018,00	(1.550.051.100,00)	(7,77)
52105	Belanja Pegawai BLUD	13.818.438.200,00	11.760.634.767,00	(2.057.803.433,00)	(14,89)
52106	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.396.500.000,00	2.872.500.000,00	(524.000.000,00)	(15,43)
522	BELANJA BARANG DAN JASA	384.614.415.039,00	344.955.658.684,00	(39.658.756.355,00)	(10,31)
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	12.363.035.687,00	10.988.071.456,00	(1.374.964.231,00)	(11,12)
52202	Belanja Bahan/Material	31.808.207.250,00	30.154.477.004,00	(1.653.730.246,00)	(5,20)
52203	Belanja Jasa Kantor	30.865.962.488,00	34.602.036.846,00	3.736.074.358,00	12,10
52204	Belanja Premi Asuransi	23.013.244.671,00	18.321.970.908,00	(4.691.273.763,00)	(20,39)
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.066.314.758,00	2.793.220.808,00	(273.093.950,00)	(8,91)
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.188.610.092,00	5.491.094.369,00	(697.515.723,00)	(11,27)
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.606.080.000,00	1.187.453.427,00	(418.626.573,00)	(26,07)
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	232.620.000,00	187.041.000,00	(45.579.000,00)	(19,59)
52209	Belanja Sewa Alat Berat	360.853.500,00	337.062.150,00	(23.791.350,00)	(6,59)
52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.131.421.300,00	1.850.105.980,00	(281.315.320,00)	(13,20)
52211	Belanja Makanan dan Minuman	15.858.445.327,00	11.933.023.555,00	(3.925.421.772,00)	(24,75)
52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.822.297.200,00	1.614.433.305,00	(207.863.895,00)	(11,41)
52213	Belanja Pakaian Kerja	922.714.500,00	602.255.600,00	(320.458.900,00)	(34,73)
52214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.090.262.900,00	1.057.498.500,00	(32.764.400,00)	(3,01)
52215	Belanja Perjalanan Dinas	28.896.756.967,00	22.954.080.706,00	(5.942.676.261,00)	(20,57)
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.929.145.000,00	3.470.527.984,00	(1.458.617.016,00)	(29,59)
52220	Belanja Pemeliharaan	4.350.279.900,00	4.164.771.979,00	(185.507.921,00)	(4,26)
52221	Belanja Jasa Konsultansi	2.595.628.900,00	2.442.140.300,00	(153.488.600,00)	(5,91)
52222	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.957.740.891,00	28.886.074.413,00	(7.071.666.478,00)	(19,67)
52223	Belanja Barang dan Jasa BLUD	158.947.788.093,00	145.767.338.546,00	(13.180.449.547,00)	(8,29)
52224	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.047.469.615,00	15.155.504.948,00	(891.964.667,00)	(5,56)
52225	Belanja Kepesertaan	1.549.536.000,00	987.474.900,00	(562.061.100,00)	(36,27)

		1.075.000.000,00	507.474.500,00	(567.525.500,00)	(52,21)
523	BELANJA MODAL	115.814.908.270,00	102.083.054.523,00	(13.731.853.747,00)	(11,86)
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	99.999.200,00	93.448.300,00	(6.550.900,00)	(6,55)
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.483.500,00	3.896.630.500,00	(208.853.000,00)	(5,09)
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00	21.600.000,00	(11.400.000,00)	(34,55)
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	237.880.448,00	214.980.699,00	(22.899.749,00)	(9,63)
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.846.200,00	222.633.000,00	(6.213.200,00)	(2,72)
52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.569.645.066,00	1.545.031.148,00	(24.613.918,00)	(1,57)
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.944.743.913,00	6.747.957.087,00	(196.786.826,00)	(2,83)
52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	543.450.200,00	529.505.700,00	(13.944.500,00)	(2,57)
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	174.234.700,00	166.401.175,00	(7.833.525,00)	(4,50)
52315	Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga	401.390.330,00	366.149.776,00	(35.240.554,00)	(8,78)
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	329.958.999,00	(10.545.801,00)	(3,10)
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	173.662.000,00	162.854.000,00	(10.808.000,00)	(6,22)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.933.200,00	24.933.200,00	0,00	0,00
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.678.050,00	10.461.780.939,00	2.138.102.889,00	25,69
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.087.668.000,00	883.695.553,00	(203.972.447,00)	(18,75)
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.798.801,00	7.929.293.489,00	(923.505.312,00)	(10,43)
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.221.363.000,00	6.385.289.952,00	(836.073.048,00)	(11,58)
52324	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000,00	263.182.100,00	(6.749.559.900,00)	(96,25)
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	27.222.526.919,00	25.866.946.867,00	(1.355.580.052,00)	(4,98)
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270.000,00)	(0,47)
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	538.315.000,00	336.893.120,00	(201.421.880,00)	(37,42)
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426.145.000,00	235.848.550,00	(190.296.450,00)	(44,66)
52332	Belanja Modal BOS	29.385.732.285,00	25.722.157.105,00	(3.663.575.180,00)	(12,47)
52333	Belanja Modal BLUD	10.796.340.658,00	9.606.328.264,00	(1.190.012.394,00)	(11,02)
	Jumlah Belanja	1.903.418.786.991,00	1.783.202.807.598,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
	Surplus (Defisit)	(114.125.703.367,00)	47.587.099.960,00	6.090.276.026,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
616	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
61606	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
617	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
61701	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
622	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
625	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
62501	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.636.369.463,00	5.716.336.105,00	79.966.642,00	1,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.636.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
	Pembiayaan Netto	114.125.703.367,00	114.861.090.645,00	(735.387.278,00)	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	162.448.190.605,00	0,00	0,00

\*Data LRA sd 31 Desember 2020 upload dari aplikasi tanggal 16 Februari 2021 jam 07.24.

## 10. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019)

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.  
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran	3750	3758	1810	1859	2.754	2.862
jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	4525	4400	2200	2175	2.815	2.966
Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan (%)	82,87	84,41	81,73	85,47	97,83	96,49

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 97,83% dan 96,49% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2015-2020) adalah sebesar 88,13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan, sehingga antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

## 11. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019).

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.  
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	2	3	3	4	6
total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	28,57	42,86	42,86	57,14	85,71

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada tahun 2020 (sampai dengan Triwulan IV) sebesar 85,71% atau mengalami peningkatan sebesar 28,54% dibanding tahun 2019. Realisasi dokumen penganggaran yang tepat waktu sebanyak 6 (enam) dokumen dari 7 (tujuh) dokumen yang direncanakan. Terdapat 1 (satu) dokumen yang belum tepat waktu yaitu penyampaian RAPBD kepada DPRD, hal ini disebabkan oleh keterlambatan beberapa SKPD pengampu kegiatan dalam meng-input rencana kerja dan kegiatan pada aplikasi *e-budgeting*. Tindak lanjutnya perlu asistensi kepada SKPD pada saat jadwal *input e-budgeting*.



Data Dokumen Penganggaran kabupaten Temanggung  
Tahun 2015-020 s.d Triwulan IV

No	Dokumen Penganggaran	T A H U N						%
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	x	x	√	√	33,33
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	x	x	√	16,67
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	x	x	√	16,67
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	x	x	0,00
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	√	x	√	√	√	√	83,34
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	√	√	√	√	√	√	100
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	√	√	√	√	√	√	100

Sumber Data : Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Keterangan:√ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

## 12. Prosentase Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2020).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1.  
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu  
2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	8.566
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.2.  
Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	339	339
2	Dinas Kesehatan	308	308
3	Puskesmas Rejosari	20	20
4	Puskesmas Dharma Rini	18	18
5	Puskesmas Bulu	20	20
6	Puskesmas Tembarak	22	22
7	Puskesmas Selopampang	21	21
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	24	24
10	Puskesmas Tlogomulyo	24	24
11	Puskesmas Pringsurat	21	21
12	Puskesmas Kaloran	21	21
13	Puskesmas Kandangan	22	22
14	Puskesmas Kedu	20	20
15	Puskesmas Parakan	22	22
16	Puskesmas Bansari	21	21
17	Puskesmas Kledung	24	24
18	Puskesmas Ngadirejo	20	20
19	Puskesmas Jumo	24	24
20	Puskesmas Gemawang	18	18
21	Puskesmas Tretep	21	21
22	Puskesmas Candiroto	22	22
23	Puskesmas Bejen	21	21
24	Puskesmas Tepusen	22	22
25	Puskesmas Traji	20	20
26	Puskesmas Pare	23	23
27	Puskesmas Wonoboyo	22	22
28	Puskesmas Banjarsari	19	19
29	Rumah Sakit Umum Daerah	58	58
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	596	596
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98	98

32	Dinas Sosial	125	125
33	Dinas Tenaga Kerja	115	115
34	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	77	77
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	298	298
36	Dinas Lingkungan Hidup	143	143
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118	118
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	168	168
39	Dinas Perhubungan	170	170
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	175	175
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	229	229
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95	95
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	136	136
44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	109	109
45	Dinas Perikanan dan Peternakan	103	103
46	Inspektorat	65	65
47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	211	211
48	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	239	239
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93	93
49	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	752	752
50	Bupati dan Wakil Bupati	21	21
51	Bagian Pemerintahan	7	7
52	Bagian Hukum	7	7
53	Bagian Perekonomian	7	7
54	Bagian Pembangunan	5	5
55	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15	15
56	Bagian Umum	168	168
57	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	9	9
58	Bagian Hubungan Masyarakat	80	80
59	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	36	36
60	Sekretariat DPRD	118	118
61	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52	52
62	Badan Penanggulangan Bencana	124	124

	Daerah		
63	Kesatuan Bangsa dan Politik	65	65
64	Kecamatan Temanggung	75	75
65	Kelurahan Temanggung I	48	48
66	Kelurahan Temanggung II	54	54
67	Kelurahan Butuh	54	54
68	Kelurahan Jampiroso	40	40
69	Kelurahan Jampirejo	41	41
70	Kelurahan Kertosari	47	47
71	Kelurahan Banyuurip	54	54
72	Kelurahan Kowangan	49	49
73	Kelurahan Jurang	54	54
74	Kelurahan Tlogorejo	36	36
75	Kelurahan Kebonsari	62	62
76	Kelurahan Manding	54	54
77	Kelurahan Mungseng	50	50
78	Kelurahan Purworejo	47	47
79	Kelurahan Giyanti	45	45
80	Kelurahan Madureso	38	38
81	Kelurahan Sidorejo	50	50
82	Kelurahan Walitelon Selatan	53	53
83	Kelurahan Walitelon Utara	50	50
84	Kecamatan Tembarak	71	71
85	Kecamatan Pringsurat	74	74
86	Kecamatan Kaloran	78	78
87	Kecamatan Parakan	83	83
88	Kelurahan Parakan Kauman	40	40
89	Kelurahan Parakan Wetan	36	36
90	Kecamatan Bulu	78	78
91	Kecamatan Kedu	70	70
92	Kecamatan Kandangan	65	65
93	Kecamatan Candiroto	59	59
94	Kecamatan Ngadirejo	74	74
95	Kelurahan Manggong	39	39
96	Kecamatan Jumo	52	52
97	Kecamatan Wonoboyo	72	72
98	Kecamatan Kranggan	72	72

99	Kelurahan Kranggan	35	35
100	Kecamatan Bejen	75	75
101	Kecamatan Kledung	76	76
102	Kecamatan Bansari	69	69
103	Kecamatan Tlogomulyo	67	67
104	Kecamatan Selopampang	64	64
105	Kecamatan Gemawang	59	59
106	Kecamatan Tretep	69	69
	JUMLAH	8.566	8.566

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan Tahun 2020

**CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL  
NON BELANJA PEGAWAI**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD		
3.	SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR

Tabel 12.3.  
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN  
PADA TAHUN 2020

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	471	464

2	PEBRUARI	426	426
3	MARET	668	527
4	APRIL	516	516
5	MEI	680	680
6	JUNI	628	628
7	JULI	769	766
8	AGUSTUS	725	691
9	SEPTEMBER	571	608
10	OKTOBER	745	765
11	NOVEMBER	1.002	1.021
12	DESEMBER	1.365	1.474
	Jumlah	8566	8566

*Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan*

Berdasarkan Tabel 12.3 terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu, hal ini dikarenakan pengajuan SPM yang telah dikoreksi (diverifikasi) belum ditindaklanjuti oleh SKPD sehingga atas ajuan SPM tersebut belum bisa diterbitkan SP2Dnya. Apabila koreksi pengajuan SPM sudah ditindaklanjuti oleh SKPD, dinyatakan benar dan lengkap oleh verifikator (BUD) maka SP2D akan diterbitkan, sebagaimana

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

**13 Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja**

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004 )

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.1.  
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah satuan kerja yang tertib	55	61	130	134	136	137
Jumlah satuan kerja	81	81	168	168	168	168
Persentase (%)	67,90	75,31	77,38	79,76	80,95	81,55

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020



Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2020 Triwulan IV (Okt - Des), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 81,55%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.2.  
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel  
Tahun Anggaran 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga				V	V	V
2	Koorwilcam Temanggung				V	V	V
3	SMPN 1 Temanggung	V	V	V			
4	SMPN 2 Temanggung	V	V	V			
5	SMPN 3 Temanggung	V	V	V			
6	SMPN 4 Temanggung				V	V	V
7	SMPN 5 Temanggung				V	V	V
8	SMPN 6 Temanggung				V	V	V
9	Koorwilcam Tembarak	V	V	V			
10	SMPN 1 Tembarak				V	V	V
11	Koorwilcam Pringsurat	V	V	V			
12	SMPN 1 Pringsurat				V	V	V
13	SMPN 2 Pringsurat	V	V	V			
14	Koorwilcam Kaloran	V	V	V			
15	SMPN 1 Kaloran				V	V	V
16	SMPN 2 Kaloran				V	V	V
17	SMPN 3 Kaloran				V	V	V
18	Koorwilcam Parakan	V	V	V			
19	SMPN 1 Parakan	V	V	V			
20	Koorwilcam Bulu	V	V	V			
21	SMPN 1 Bulu				V	V	V
22	SMPN 2 Bulu				V	V	V
23	SMPN 3 Bulu				V	V	V
24	Koorwilcam Kedu	V	V	V			
25	SMPN 1 Kedu	V	V	V			
26	SMPN 2 Kedu				V	V	V
27	SMPN 3 Kedu	V	V	V			
28	Koorwilcam Kandangan	V	V	V			
29	SMPN 1 Kandangan	V	V	V			
30	SMPN 2 Kandangan				V	V	V
31	SMPN 3 Kandangan				V	V	V
32	Koorwilcam Candiroto	V	V	V			
33	SMPN 1 Candiroto	V	V	V			
34	SMPN 2 Candiroto				V	V	V

35	Koorwilcam Ngadirejo	V	V	V			
36	SMPN 1 Ngadirejo				V	V	V
37	SMPN 2 Ngadirejo	V	V	V			
38	Koorwilcam Jumo				V	V	V
39	SMPN 1 Jumo	V	V	V			
40	Koorwilcam Wonobojo	V	V	V			
41	SMPN 1 Wonobojo				V	V	V
42	SMPN 2 Wonobojo				V	V	V
43	Koorwilcam Kranggan	V	V	V			
44	SMPN 1 Kranggan				V	V	V
45	SMPN 2 Kranggan				V	V	V
46	Koorwilcam Bejen	V	V	V			
47	SMPN 1 Bejen	V	V	V			
48	SMPN 2 Bejen				V	V	V
49	Koorwilcam Kledung	V	V	V			
50	SMPN 1 Kledung	V	V	V			
51	SMPN 2 Kledung				V	V	V
52	Koorwilcam Bansari				V	V	V
53	SMPN 1 Bansari				V	V	V
54	Koorwilcam Tlogomulyo	V	V	V			
55	SMPN 1 Tlogomulyo	V	V	V			
56	SMPN 2 Tlogomulyo				V	V	V
57	Koorwilcam Selopampang	V	V	V			
58	SMPN 1 Selopampang	V	V	V			
59	SMPN 2 Selopampang	V	V	V			
60	Koorwilcam Gemawang	V	V	V			
61	SMPN 1 Gemawang	V	V	V			
62	Koorwilcam Tretep				V	V	V
63	SMPN 1 Tretep				V	V	V
64	SKB				V	V	V
65	Dinas Kesehatan	V	V	V			
66	UPT Puskesmas Temanggung	V	V	V			
67	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	V	V			
68	UPT Puskesmas Tembarak	V	V	V			
69	UPT Puskesmas Selopampang	V	V	V			
70	UPT Puskesmas Pringsurat	V	V	V			
71	UPT Puskesmas Kranggan	V	V	V			
72	UPT Puskesmas Pare	V	V	V			
73	UPT Puskesmas Parakan	V	V	V			
74	UPT Puskesmas Traji	V	V	V			
75	UPT Puskesmas Bulu	V	V	V			
76	UPT Puskesmas Ngadirejo	V	V	V			
77	UPT Puskesmas Kaloran	V	V	V			
78	UPT Puskesmas Tepusen	V	V	V			
79	UPT Puskesmas Candiroto	V	V	V			
80	UPT Puskesmas Bejen	V	V	V			
81	UPT Puskesmas Bansari	V	V	V			
82	UPT Puskesmas Wonobojo	V	V	V			
83	UPT Puskesmas Tretep	V	V	V			

84	UPT Puskesmas Kedu	V	V	V			
85	UPT Puskesmas Kledung	V	V	V			
86	UPT Puskesmas Kandangan	V	V	V			
87	UPT Puskesmas Jumo	V	V	V			
88	UPT Puskesmas Gemawang	V	V	V			
89	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	V	V			
90	UPT Puskesmas Rejosari	V	V	V			
91	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	V	V	V			
92	Dinas Sosial	V	V	V			
93	Dinas Tenaga Kerja	V	V	V			
94	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A	V	V	V			
95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	V	V			
96	Dinas Lingkungan Hidup	V	V	V			
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	V	V			
98	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	V	V	V			
99	Dinas Perhubungan	V	V	V			
100	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	V	V			
101	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	V	V	V			
102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP	V	V	V			
103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	V	V			
104	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	V	V			
105	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	V	V			
106	Inspektorat	V	V	V			
107	BAPPEDA	V	V	V			
108	BPPKAD	V	V	V			
109	BKD dan Pengembangan SDM	V	V	V			
110	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V	V	V			
111	Pengelola	V	V	V			
112	Bagian Umum	V	V	V			
113	Bagian Humas	V	V	V			
114	Bagian Hukum	V	V	V			
115	Bagian Kesra	V	V	V			
116	Bagian Perekonomian	V	V	V			
117	Bagian Pembangunan	V	V	V			
118	Bagian Pemerintahan	V	V	V			
119	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	V	V	V			

120	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	V	V	V			
121	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	V	V			
122	Rumah Sakit Umum Daerah	V	V	V			
123	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	V	V	V			
124	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran	V	V	V			
125	Kecamatan Temanggung	V	V	V			
126	Kelurahan Temanggung I	V	V	V			
127	Kelurahan Temanggung II	V	V	V			
128	Kelurahan Butuh	V	V	V			
129	Kelurahan Jampiroso	V	V	V			
130	Kelurahan Jampirejo	V	V	V			
131	Kelurahan Kertosari	V	V	V			
132	Kelurahan Banyuurip	V	V	V			
133	Kelurahan Kowangan	V	V	V			
134	Kelurahan Jurang	V	V	V			
135	Kelurahan Madureso	V	V	V			
136	Kelurahan Sidorejo	V	V	V			
137	Kelurahan Tlogorejo	V	V	V			
138	Kelurahan Kebonsari	V	V	V			
139	Kelurahan Manding	V	V	V			
140	Kelurahan Mungseng	V	V	V			
141	Kelurahan Purworejo	V	V	V			
142	Kelurahan Giyanti	V	V	V			
143	Kelurahan Walitelon Selatan	V	V	V			
144	Kelurahan Walitelon Utara	V	V	V			
145	Kecamatan Tembarak	V	V	V			
146	Kecamatan Pringsurat	V	V	V			
147	Kecamatan Kaloran	V	V	V			
148	Kecamatan Parakan	V	V	V			
149	Kelurahan Parakan Wetan	V	V	V			
150	Kelurahan Parakan Kauman	V	V	V			
151	Kecamatan Bulu	V	V	V			
152	Kecamatan Kedu	V	V	V			
153	Kecamatan Kandangan	V	V	V			
154	Kecamatan Candiroto	V	V	V			
155	Kecamatan Ngadirejo	V	V	V			
156	Kelurahan Manggong	V	V	V			
157	Kecamatan Jumo	V	V	V			
158	Kecamatan Wonobojo	V	V	V			
159	Kecamatan Kranggan	V	V	V			
160	Kelurahan Kranggan	V	V	V			
161	Kecamatan Bejen	V	V	V			
162	Kecamatan Kledung	V	V	V			
163	Kecamatan Bansari	V	V	V			
164	Kecamatan Tlogomulyo	V	V	V			

165	Kecamatan Selopampang	V	V	V			
166	Kecamatan Gemawang	V	V	V			
167	Kecamatan Tretep	V	V	V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan Aset Tahun 2020

#### 14. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 14.1.  
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	n.a	n.a	2.150	2.350	3.391	945
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	n.a	n.a	2.462	2.462	3.441	1.200
Persentase (%)	n.a	n.a	87,33	95,45	98,55	78,75

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN), belum diserahkan ke PEMDA (contoh: Rusunawa).

3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2019, pada Tahun 2020 mengalami penurunan pemanfaatan aset. Jumlah pemanfaatan tahun 2020 sebesar 78,75 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14.2.  
Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2020  
Triwulan IV

Uraian	2020	2020
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	120
Jumlah	1.200	945

*Sumber : Data Pemanfaatan aset Tahun 2020*

### **15.Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari

pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15.1.  
 Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel  
 Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah.	81	81	47	47	47	47
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	73	75	44	44	45	39
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	90	92	93	93	95,74	82,98

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015-2020 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap laporan keuangan di SKPD. Tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan periode triwulan IV persentasenya menurun karena pergantian personil yang menangani atau mengelola penatausahaan keuangan. Oleh karena itu BPPKAD berupaya melakukan asistensi atau pendampingan terhadap Perangkat Daerah.

Tabel 15.2.  
 Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V	V	
2	Dinas Kesehatan	V		V		V	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V	V	
4	Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V		V	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V		V	
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V		V	
7	Dinas Sosial	V		V		V	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V		V	
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V		V	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V	V	
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V		V	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V		V	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V		V	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V		V	
15	Dinas Perhubungan		V	V		V	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V		V	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V		V	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			V
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V		V	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V		V	
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V		V	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V		V	
23	Sekretariat Daerah	V		V		V	
24	Kecamatan Temanggung		V	V		V	
25	Kecamatan Tembarak		V		V	V	
26	Kecamatan Pringsurat		V		V	V	
27	Kecamatan Kaloran		V	V			V
28	Kecamatan Parakan	V		V		V	
29	Kecamatan Bulu	V		V		V	
30	Kecamatan Kedu	V			V	V	
31	Kecamatan Kandangan	V		V		V	
32	Kecamatan Candiroto		V	V		V	
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			V
34	Kecamatan Jumo	V		V		V	
35	Kecamatan Wonobojo	V		V		V	
36	Kecamatan Kranggan		V	V			V
37	Kecamatan Bejen	V		V			V
38	Kecamatan Kledung	V		V		V	
39	Kecamatan Bansari		V	V		V	



40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		V	
41	Kecamatan Selopampang	V		V		V	
42	Kecamatan Gemawang	V		V		V	
43	Kecamatan Tretep	V			V	V	
44	Inspektorat	V		V		V	
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V		V	
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V		V	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V		V	
	JUMLAH	37	10	40	7	42	5

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

### 16. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100 %

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.1.  
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	65	65	40	40	40	39
Jumlah Perangkat Daerah (%)	81	81	47	47	47	47
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	80,25	80,25	85,11	85,11	85,11	82,98

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015 sampai 2019 terdapat peningkatan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu tetapi Tahun 2020 Triwulan IV terdapat penurunan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan penurunan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan BPPKAD agar Perangkat Daerah tertib dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah dengan melakukan penguncian aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai untuk laporan semester II.

Adapun Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 16.2.  
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Perangkat Daerah	Oktober		November		Desember	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V			V	V	
2	Dinas Kesehatan	V		V		V	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V			V	V	
4	Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		V		V	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V		V	
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		V	V		V	
7	Dinas Sosial	V		V		V	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V		V	
9	Dinas Tenaga Kerja	V		V		V	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V			V	V	
11	Dinas Lingkungan Hidup	V		V			V
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V		V			V
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V		V		V	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	V		V		V	
15	Dinas Perhubungan		V	V		V	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V		V	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V		V		V	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	V		V			V
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V		V	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V		V		V	
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		V	V		V	
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V		V		V	
23	Sekretariat Daerah	V		V			V
24	Kecamatan Temanggung		V	V		V	
25	Kecamatan Tembarak		V		V	V	
26	Kecamatan Pringsurat		V		V	V	
27	Kecamatan Kaloran		V	V			V
28	Kecamatan Parakan	V		V		V	
29	Kecamatan Bulu	V		V		V	
30	Kecamatan Kedu	V			V	V	
31	Kecamatan Kandangan	V		V		V	
32	Kecamatan Candiroti		V	V		V	
33	Kecamatan Ngadirejo	V		V			V
34	Kecamatan Jumo	V		V		V	
35	Kecamatan Wonoboyo	V		V		V	
36	Kecamatan Kranggan		V	V			V
37	Kecamatan Bejen	V		V			V
38	Kecamatan Kledung	V		V		V	
39	Kecamatan Bansari		V	V		V	

40	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		V	
41	Kecamatan Selopampang	V		V		V	
42	Kecamatan Gemawang	V		V		V	
43	Kecamatan Tretep	V			V	V	
44	Inspektorat	V		V		V	
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	V		V		V	
46	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	V		V		V	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V		V	
	JUMLAH	37	10	40	7	39	8

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

### 17. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertipikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertipikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertipikat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17.1.  
Persentase Tanah Pemda yang bersertipikat  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tanah Pemda yang	1240	1276	1336	1342	1355	1366

sudah bersertipikat						
Jumlah Tanah Pemda	2798	2813	2832	2839	2839	2861
Persentase (%)	44,32	45,36	47,18	47,27	47,27	47,74

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2020 sebesar 47,74 %. Jumlah sertifikat yang terbit tahun 2020 adalah 34 buah sertifikat, tetapi sertifikat yang baru hanya 11 buah, sedangkan untuk 23 buah adalah perubahan hak dari atas nama Pemerintah Desa ke atas nama Pemerintah Daerah.

Tabel 17.2.  
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2020  
Triwulan IV

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertipikat tanah yang terbit	-	-	30	30

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah

### 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan				no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif							
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>21.414.697.030</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					<b>21.414.697.000</b>
	<i>Administrasi Keuangan</i>					<b>10.830.749.030</b>		<i>Administrasi Keuangan</i>					<b>10.830.749.000</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	1. Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	2.584.863.308		1. Belanja Pegawai	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	2.584.863.308
			tunjangan keluarga			271.726.064				tunjangan keluarga			271.726.064
			tunjangan jabatan			245.335.650				tunjangan jabatan			245.335.650
			tunjangan fungsional			30.693.600				tunjangan fungsional			30.693.600

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			tunjangan fungsional umum			57.195.250
			tunjanagn beras			163.625.024
			tunjangan PPH ( khusus			15.069.562
			pembulatan gaji			34.132
			asuransi kesehatan			211.419.145
			Tapera			26.427.395
	2. Dana Insentif Desa	Kab Tmg				-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	14	Bulan	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	Kab Tmg				2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	Kab Tmg				2.880.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif
				Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
			tunjangan fungsional umum			57.195.250
			tunjanagn beras			163.625.024
			tunjangan PPH ( khusus			15.069.562
			pembulatan gaji			34.102
			asuransi kesehatan			211.419.145
			Tapera			26.427.395
	2. Dana Insentif Desa	Kab Tmg				-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	14	Bulan	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	Kab Tmg				2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	Tmg				2.880.000.000



RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
						10.583.948.000
						1.471.948.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>293.948.000</b>
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12		25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	15.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Indikatif
				Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
						10.583.948.000
						1.471.948.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>293.948.000</b>
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12		25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	15.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tmg	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12		3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12		95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					175.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Tmg	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12		3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tmg	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12		95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					<b>175.000.000</b>

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	12	bulan	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	12	Bulan	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	733.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	5.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	12	bulan	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	12	Bulan	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Bulan	<b>733.000.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	5.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	24	orang	478.000.000
		Kab Tmg	seragam dinas karyawan	74	orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	100.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	24	orang	478.000.000
		Kab Tmg	seragam dinas karyawan	74	orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					<b>270.000.000</b>
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12		50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						4.202.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	90.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12		50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						<b>4.202.000.000</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						<b>1.750.000.000</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Tmg	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	4	dokumen	110.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	40.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	8.608	dokumen	40.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	8.608	dokumen	30.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	4	dokumen	200.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Tmg	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	dokumen	75.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	4324	dokumen	30.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Tmg	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	4324	dokumen	20.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	265.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	4	dokumen	150.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	1	paket	1.150.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	220.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	1	paket	1.000.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	50.000.000
	penyusunan sistem informasi keuangan daerah					
	Penyusunan Analisis standar belanja ( Lanjutan)					
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					680.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000
	penyusunan sistem informasi keuangan daerah					
	Penyusunan Analisis standar belanja ( Lanjutan)					
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					<b>680.000.000</b>



RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	kegiatan	500.000.000
			Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	6.335	ASN/Orang	
		Kab Tmg	Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah	12	kegiatan	
		Kab Tmg	Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	kegiatan	500.000.000
			Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	6.335	ASN/Orang	
		Kab Tmg	Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah	12	kegiatan	
		Kab Tmg	Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se- Kab Tmg	12	kegiatan	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung	104	unit kerja	
		Kab Tmg	terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung	104	unit kerja	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	120.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung	104	unit kerja	
		Kab Tmg	terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung	104	unit kerja	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	120.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	104	unit kerja	
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	60.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya	12	kegiatan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.772.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	104	unit kerja	
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	60.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya	12	kegiatan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					<b>1.772.000.000</b>

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Tmg	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	104	Unit Kerja	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	104	Unit Kerja	150.000.000
		Kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan daerah	1	Dokumen	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	104	Unit Kerja	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	150.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokumen	170.000.000
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tmg				170.000.000
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tmg				1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus	104	unit kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	Penyusunan Standar Harga	Kab Tmg	Tersusunnya standar harga	168	SATUAN KERJA	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	1	Aplikasi	875.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	168	SATUAN KERJA	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tmg				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	Penyusunan Standar Harga	Kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	1	Aplikasi	875.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	578	SATUAN KERJA	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	168	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	168	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah)	168	SATUAN KERJA	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1.000	bidang	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	296	tanah/Bangunan	135.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	578	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	578	SATUAN KERJA	
		Kab Tmg	Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah)	578	SATUAN KERJA	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari	578	tanah/Bangunan	135.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	168	SATUAN KERJA	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	168	Unit Kerja	540.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	168	Unit Kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			sewa tanah eks bengkok			
		Kab Tmg	Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	578	SATUAN KERJA	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	578	Unit Kerja	540.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	578	Unit Kerja	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					



RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kec parakan	pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2	29.000	SKPD dan SKPKD	1.100.000.000
		Kab Tmg	terverif perub data tepat waktu	10.000	sppt	
		Kab Tmg	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	280.000	OP	
		Kab Tmg	Peta digitasi obyek pajak blok	10.000	op	
		Kab Tmg	terlaksana pendataan wajib/ obyek pajak daerah	7.000	op	
		desa m/ kel se kec. Tmg	Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	24	desa/ kelurahan	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kec parakan	Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah	12	Bulan	620.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah	10000	dokumen	
		Kab Tmg	Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB – P2	20	Kecamatan	
		Kab Tmg	Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD	23	Pengelola PAD	
		Kab Tmg	Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah	10000	OP/WP	
		desa m/ kel se kec. Tmg	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek	5	Obyek Pajak	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB	5	Op	
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Tmg	Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	1	SIM PBB	420.000.000
		Kab Tmg	Tercetaknya SPPT DHKP	289	DHKP	
		Kab Tmg	Tercetaknya SPPT PBB	585.000	SPPT	
		Kab Tmg	Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar	188	SKPD dan SKPKD	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Pajak PBB			
		Kab Tmg				
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan pajak daerah	1000	SKPD	420.000.000
		Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2	600000	SPPT	
		Kab Tmg	Tercetaknya DHKP SPPT PBB-P2	289	DHKP	
		Kab Tmg	Terlaksananya penetapan dan cetak pemuakhiran SPPT PBB-P2	12000	Objek Pajak	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah	7	Pajak Daerah	
		Kab Tmg	Terakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	110.000	Objek Pajak	
		Kab Tmg	Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	125	Box	
7	sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg	3 komputer pelayanan, <i>cardreader</i>	12	bulan	60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	45.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Kab Tmg	Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah	4	aplikasi	
		Kab Tmg				
		Kab Tmg				
7	sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg				60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	Kab Tmg				525.000.000
			Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)	24	desa / kelurahan	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022						
No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7					5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	65.000.000	9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tmg				65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.800.000.000		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					2.800.000.000		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	BPPKA D	bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah			2.800.000.000		Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	BPPKA D	bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah			2.800.000.000
		BPPKA D	Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021						BPPKA D	Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021			

Sumber :BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh (Perangkat Daerah). Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
Nihil					

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	OpenTax	BPKPAD	ABPD	system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online	Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara online..opentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas NJOP Simulasi stimulus ataupun relaksasi	Digunakan untuk perencanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawa ban pengelolaan PBB	BPPKAD 2019

2	Mapatda	BPKPAD	ABPD	Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data	Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2019
3	SiTante	BPKPAD	ABPD	Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
4	Klinik Akuntansi	BPKPAD	ABPD	Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.	Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
5	E BPHTB	BPKPAD	ABPD	aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN.	Akses Wajib pajak dengan memasukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2020
	PBB-Online	BPKPAD	ABPD	Pelayanan PBB-P2 online	Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menuaikan kewajiban membayar pajak	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 7	BPK	Nasional	BPPKAD
2	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPPKAD

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas berbasis Tehnologi”.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini adalah dalam rangka: “Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan”.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten  
Temanggung Tahun 2022

**VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2020
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengkajian pembangunan daerah dan		WTP	-	100	100
			Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,96	1,06
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100
			Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	0,66
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
			Peningkatan pendapatan daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	92,54
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	100	100
			Pengelolaan keuangan daerah	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	90,51	90,05
				Prosentase konsistensi penganggaran	%	100	96,49

				terhadap Perencanaan			
				Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	85,71
				Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100
			Pengelolaan aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	86,31	66,47
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,9	99,39
			Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	97	82,98
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	97	82,98

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung  
Tahun 2022

<b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>21.414.697.000</b>
	<i>Administrasi Keuangan</i>	<b>10.830.749.000</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Belanja Pegawai	3.606.389.100
	2. Dana Insentif Desa	-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	2.880.000.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>10.583.948.000</b>
		1.471.948.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>293.948.000</b>
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan	

<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>21.414.697.000</b>
	<i>Administrasi Keuangan</i>	<b>10.830.749.000</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Belanja Pegawai	3.606.389.100
	2. Dana Insentif Desa	-
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	2.169.359.900
	4. Biaya pemungutan pajak daerah	2.175.000.000
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS	2.880.000.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>10.583.948.000</b>
		1.471.948.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>293.948.000</b>
	Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan	

<b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.000.000

<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.948.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>719.800.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.800.000

<b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.202.000.000</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.750.000.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	90.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200.000.000

<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>270.000.000</b>
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.202.000.000</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<b>1.750.000.000</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	110.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	75.000.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	20.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	265.000.000

RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	150.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.150.000.000
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	680.000.000
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120.000.000
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.772.000.000
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	220.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.000.000.000
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<b>680.000.000</b>
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	500.000.000
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120.000.000
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<b>1.772.000.000</b>
3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.000.000
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	170.000.000

<b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	875.000.000
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	135.000.000
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	540.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.690.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.100.000.000

<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.400.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.220.000.000
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Penyusunan Standar Harga	70.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	875.000.000
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.600.000.000
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	135.000.000
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	540.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<b>1.690.000.000</b>
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	620.000.000



<b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	420.000.000
7	sarana prasarana pelayanan kantor	60.000.000
8	Penagihan Pajak Daerah	45.000.000
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.800.000.000

<b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b>		
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	480.000.000
7	sarana prasarana pelayanan kantor	
8	Penagihan Pajak Daerah	525.000.000
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.800.000.000
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.800.000.000
	Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.800.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022.

Tabel 3.3  
Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung  
Tahun 2022

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2.021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X X X	1					21.401.497.000					21.401.497.030		
X X X	1	2.0				10.830.749.000	15.050.683.243	31.080.029.503	12.629.022.606		10.830.749.030		
X X X	1	2.0	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.855.669.603	7.687.554.187			
					1. Belanja Pegawai								
					Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	Kab Tmg	14	Bulan	2.584.863.308	6.807.887.353	2.746.085.768	2.584.863.308	DAU
					tunjangan keluarga				271.726.064			271.726.064	
					tunjangan jabatan				245.335.650			245.335.650	
					tunjangan fungsional				30.693.600			30.693.600	
					tunjangan fungsional umum				57.195.250			57.195.250	
					tunjanagn beras				163.625.024			163.625.024	
					tunjangan PPH ( khusus				15.069.562			15.069.562	
					pembulatan gaji				34.102			34.132	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		asuransi kesehatan				211.419.145					211.419.145					
		Tapera				26.427.395					26.427.395					
	2. Dana Insentif Desa		Kab Tmg			-	480.000.000				-					
	3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Kab Tmg	14	Bulan	2.169.359.900	2.281.795.890	2.169.359.900	1.565.100.080		2.169.359.900	DAU				
	4. Biaya pemungutan pajak daerah		Kab Tmg			2175000000	2.500.000.000	2.175.000.000	1.220.550.000		2.175.000.000	DAU				
	5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS					2.880.000.000	2.981.000.000	2.880.000.000	2.155.818.339		2.880.000.000	DAU				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA</b>					10.570.748.000					10.570.748.000					
						1.458.748.000	931.616.000	1.529.878.034	845.020.694		1.458.748.000					
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>293.948.000</b>	<b>174.000.000</b>	<b>248.623.052</b>	<b>104.908.351</b>	<b>293.948.000</b>					
		Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan						3.225.000								
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Kab Tmg	12		25.000.000	10.000.000	13.000.000	2.437.500	18,75	25.000.000	
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Kab Tmg	12	Bulan	75.000.000	44.000.000	45.442.500	23.976.000	52,76	75.000.000	

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana	
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Kab Tmg	12	Bulan	15.000.000	10.000.000	39.999.800	16.095.750	40,24	15.000.000		
5	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab Tmg	12		3.000.000	0	2.520.000	1.602.000	63,57	3.000.000		
5	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Kab Tmg	12	Bulan	80.948.000	50.000.000	64.460.752	37.350.950	57,94	80.948.000		
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kab Tmg	12		95.000.000	60.000.000	79.975.000	23.446.151	29,32	95.000.000		
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>175.000.000</b>	<b>0</b>	<b>262.656.430</b>	<b>188.623.999</b>		<b>175.000.000</b>	
5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat	Kab Tmg	12	bulan	90.000.000	0	191.010.000	142.350.000	74,52	90.000.000		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.1.2.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,	Kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	0	71.646.430	46.273.999	64,59	85.000.000	
<b>5.2.1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				Bulan	<b>719.800.000</b>	<b>617.616.000</b>	<b>597.142.152</b>	<b>409.202.683</b>		<b>719.800.000</b>	
5.2.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kab Tmg	12	Bulan	5.000.000	3.000.000	1.500.000	585.000	39,00	5.000.000	
5.2.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Kab Tmg	12	Bulan	250.000.000	210.000.000	209.671.152	145.312.263	69,30	250.000.000	
5.2.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	Kab Tmg	24	orang	464.800.000	404.616.000	373.471.000	263.305.420	70,50	464.800.000	
		seragam dinas karyawan	Kab Tmg	74	orang			12.500.000		-		
<b>5.2.1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>270.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>421.456.400</b>	<b>142.285.661</b>		<b>270.000.000</b>	
5.2.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Kab Tmg	12	Bulan	100.000.000	80.000.000	163.620.000	83.639.161	51,12	100.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kab Tmg	12	Bulan	75.000.000	20.000.000	134.836.400	25.354.500	18,80	75.000.000	
5.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Kab Tmg	12	Bulan	45.000.000	20.000.000	73.000.000	23.222.000	31,81	45.000.000	
5.2.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	Kab Tmg	12		50.000.000	20.000.000	50.000.000	10.070.000	20,14	50.000.000	
<b>5.2.2.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					<b>4.202.000.000</b>	<b>3.731.000.000</b>	<b>3.101.531.200</b>	<b>1.351.657.951</b>		<b>4.202.000.000</b>	
<b>5.2.2.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					<b>1.750.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.113.297.400</b>	<b>407.213.192</b>		<b>1.750.000.000</b>	
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	Kab Tmg	4	dokumen	110.000.000	80.000.000				90.000.000	
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	Kab Tmg	4	dokumen	75.000.000	40.000.000	150.000.000	82.130.750	54,75	40.000.000	
5.2.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	Kab Tmg	8608	dokumen	30.000.000	40.000.000				40.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 2 2 2,0 1 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	Kab Tmg	8608	dokumen	20.000.000	20.000.000	55.099.800	1.575.000	2,86	30.000.000	
5 2 2 2,0 1 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	Kab Tmg	4	dokumen	265.000.000	195.000.000				200.000.000	
5 2 2 2,0 1 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA	Kab Tmg	4	dokumen	220.000.000	155.000.000				150.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2022														
5	2	2	2,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Kab Tmg	1	paket	1.000.000.000	1.200.000.000				1.150.000.000	
5	2	2	2,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota	Kab Tmg	1	paket	30.000.000	20.000.000	672.812.600	323.507.442	48,08	50.000.000	







KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	2	2	2,02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Kab Tmg	104	unit kerja	60.000.000	20.000.000				60.000.000	
					Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya		Kab Tmg	12	kegiatan							
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					<b>1.772.000.000</b>	<b>1.371.000.000</b>	<b>1.764.293.500</b>	<b>828.047.200</b>		<b>1.772.000.000</b>	
5	2	2	2,03	3	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	Kab Tmg	104	Unit Kerja	52.000.000	45.000.000	81.550.500	38.820.900	47,60	52.000.000	
5	2	2	2,03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	Kab Tmg	104	Unit Kerja	150.000.000	126.000.000	1.682.743.000	789.226.300	46,90	150.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Tersedianya laporan keuangan daerah	Kab Tmg	1	Dokumen											
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	Kab Tmg	4	Dokumen	170.000.000	145.000.000			170.000.000		
5	2	2	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	kabupaten temanggung	104	Unit Kerja	1.400.000.000	1.055.000.000			1.400.000.000		
5	2	2	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan	Kabupaten Temanggung	104	unit kerja		140.000.000					

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana			
			Lokasi	TARGET Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		keuangan khusus													
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>3.220.000.000</b>	<b>3.160.000.000</b>	<b>538.847.500</b>	<b>118.767.786</b>		<b>3.220.000.000</b>				
5	2	3	2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.160.000.000	538.847.500	118.767.786					
5	2	3	2,01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA	70.000.000	50.000.000			70.000.000	
5	2	3	2,01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA	Kab Tmg	1	Aplikasi	875.000.000	835.000.000			875.000.000	
						Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA			209.145.200	91.858.272		43,92
						Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA						
						Tertibnya pengelolaan barang milik daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah)	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA											
5	2	3	2,01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Kab Tmg	1000	bidang	1.600.000.000	2.000.000.000	218.927.500	9.888.700	4,52	1.600.000.000	
5	2	3	2,01	0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	Kab Tmg	296	tanah/Bangunan	135.000.000	135.000.000	110.774.800	17.020.814	15,37	135.000.000	
						Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	168	SATUAN KERJA							

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	2	3	2,01	2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	Kab Tmg	168	Unit Kerja	540.000.000	140.000.000				540.000.000	
						Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	Kab Tmg	168	Unit Kerja							
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>					<b>1.690.000.000</b>	<b>933.373.200</b>	<b>1.394.115.516</b>	<b>472.370.702</b>		<b>1.690.000.000</b>	
5	2	4	2,01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					933.373.200	1.394.115.516	472.370.702				
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2	kec parakan	29000	SKPD dan SKPKD	620.000.000	500.000.000	298.682.400	162.179.289	54,30	1.100.000.000	
						terverif perub data tepat waktu	Kab Tmg	10000	sppt							
						peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Kab Tmg	280000	OP							
						Peta digitasi obyek pajak blok	Kab Tmg	10000	op							
						terlaksanya pendataan wajib/ obyek pajak daerah	Kab Tmg	7000	op							
						Belanja Hadiah untuk desa ter cepat pelunasan sebelum jatuh tempo (DID)	desa m/ kel se kec. Temanggung	24	desa/ kelurahan							

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB	Kab Tmg	5	Op							
5	2	4	2,01	6	Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	480.000.000	367.373.200				420.000.000	
		Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	Kab Tmg	1	SIM PBB							
		Tercetaknya SPPT DHKP	Kab Tmg	289	DHKP			1.040.801.216	271.700.568			
		Tercetaknya SPPT PBB	Kab Tmg	585000	SPPT							
		Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar	Kab Tmg	188	SKPD dan SKPKD							
		Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah	Kab Tmg	7	Pajak Daerah							
		Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak	Kab Tmg	110000	Objek Pajak							



KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		daerah														
		Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal	Kab Tmg	125	Box											
	7	sarana prasarana pelayanan kantor	Kab Tmg	12	bulan						60.000.000					
5	2	4	2,01	8	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Kab Tmg	12	Bulan	525.000.000	25.000.000	13.604.400	11.328.400	83,27	45.000.000	
5	2	4	2,01	9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Kab Tmg	12	Bulan	65.000.000	41.000.000	41.027.500	27.162.445	66,21	65.000.000	

Temanggung , September 2021

KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM  
Pembina Tk. I  
NIP 197310201999031000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 57,81 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 82,11 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I 34,97 % dengan realisasi belanja

Rp. 685.063.012.795 dari total anggaran sebesar Rp. 1.958.793.940.978

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar **Rp. 21.414.697.000 (dua puluh satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)** yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022

	No	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1	administrasi keuangan daerah	Penyediaan gaji dan tunjang ASN
	2	Adminstrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	Penyediaan Jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	1	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

No	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
		Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
		Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
8		Penagihan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan

pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN DEMANGGUNG



TRIWINARNO SE, MM ↓  
Pembina Tk. I

NIP 197310201999031000